

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal – usul dan adat istiadat maupun sosial budaya masyarakat setempat. Tujuan pemekaran adalah meningkatkan perekonomian masyarakat dan mempercepat pembangunan.

(Harfi, 2013) menyatakan bahwa dengan pemekaran wilayah akan berdampak pada pembangunan dan perekonomian. Hal ini dikuatkan dengan pendapat yang menyatakan bahwa pembangunan dan perekonomian wilayah yang dimekarkan mempunyai dua dampak terhadap wilayah tersebut antara lain yaitu :

- a. Dampak positif dari pemekaran wilayah yaitu :
 1. Adanya rentang kendali pelayanan pemerintah menjadi mudah terjangkau,.
 2. Adanya peningkatan pembangunan ekonomi dengan penurunan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan tingkat kesehatan gizi buruk.
 3. Adanya peningkatan kesejahteraan.
 4. Adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 5. Adanya pemahaman pendidikan politik.

- b. Sementara dampak negatif dari pemekaran wilayah yaitu :
1. Adanya peningkatan konflik sosial masyarakat.
 2. Adanya persangingan elot politik wilayah menjadi tidak sehat.
 3. Adanya peluang korupsi, kolusi dan nepotisme naik tinggi.
 4. Dan adanya lebih dominan kepentingan pusat dari pada kepentingan mensejahteraan masyarakat lokal.

Pemekaran wilayah secara teoritis dapat dikatakan adalah suatu proses pembagian wilayah administrasi yaitu daerah otonom yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemekaran wilayah di Indonesia adalah pemekaran wilayah administrasi baru tingkat kota maupun Kabupaten dari induknya.

Kebijakan pemekaran wilayah tidak dapat dipisahkan dari otonomi daerah, karena pemekaran wilayah baik kabupaten maupun desa merupakan desain pemerintahan untuk mengimplitasikan otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah sebagai sarana percepatan pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya program pemekaran wilayah menjadi beberapa wilayah baru merupakan suatu kebijaksanaan pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pemekaran wilayah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah menurut (Made Mudana, 2016).

Jadi dengan demikian pemekaran adalah suatu daerah atau wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang utuh yang kemudian dibagi atau dimekarkan menjadi bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Gagasan pemekaran wilayah dan pembentukan Daerah Otonom Baru memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Secara yuridis landasan yang memuat persoalan pembentukan daerah terdapat dalam pasal 18 UU 1945 yang intinya, yaitu membagi daerah Indonesia atas daerah besar (provinsi) dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Selanjutnya dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang memberi peluang pembentukan daerah dalam NKRI, yaitu daerah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah menurut Andik Wahyun (2013).

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pengertian pertumbuhan yaitu perkembangan berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi (output) dan pendapatan. Berbeda dengan pembangunan ekonomi yang mengandung arti lebih luas dan mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pengertian tersebut mencakup tiga aspek yaitu : proses, output perkapita dan jangka panjang yang mencerminkan aspek dinamis dari suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu menurut (Sukirno, 2006).

Pertumbuhan ekonomi hanya salah satu syarat dari banyak syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan kapasitas penawaran atau produksi barang dan jasa yang berdasarkan pada peningkatan teknologi, penyesuaian ideologi dan kelembagaan yang dibutuhkan. Sedangkan pembangunan ekonomi mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan dan alokasi sumber daya produksi diantaranya sektor – sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatan diantara golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh menurut (Todaro, 2006).

Jadi pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan tingkat kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi maka harus membandingkan pendapatan nasional tahun ke tahun. Dalam membandingkan harus disadari juga bahwa perubahan pendapatan nasional juga dipengaruhi oleh dua hal yaitu perubahan tingkat kegiatan ekonomi dan perubahan harga – harga. Suatu ekonomi mengalami pertumbuhan jika kegiatan ekonomi yang ingin di capai agar bisa lebih tinggi dari waktu sebelumnya menurut (Arsyad, 2004).

1. Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut menurut (Trigan, 2005). Sektor basis ini digolongkan kedalam dua

sektor yaitu sektor basis dan non basis. Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. pertumbuhan industri – industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan terciptanya peluang kerja

Perekonomian suatu daerah merupakan penjumlahan dari sektor basis dan non basis menurut (Syafrizal, 2008) yang dapat dilihat dari persamaan berikut:

$$Y = B + S$$

Dimana :

Y = Pendapatan daerah

B = Sektor Basis

S = Sektor Non Basis

2. Teori lokasi

Landasan teori lokasi adalah ruang. Tanpa ruang maka tidak mungkin ada lokasi dalam studi tentang wilayah, yang dimaksud dengan ruang adalah permukaan bumi baik yang ada di atasnya maupun yang ada dibawahnya sepanjang manusia awam masih bisa menjangkaunya. Lokasi menggambarkan posisi pada ruang tersebut (dapat ditentukan bujur dan lintangnya).

Teori lokasi adalah suatu teori yang dikembangkan untuk melihat dan memperhitungkan pola lokasi kegiatan ekonomi termasuk industri dengan cara yang konsisten dan logis dan bagaimana melihat dan memperhitungkan daerah – daerah kegiatan ekonomi yang saling berhubungan. Dimana lokasi dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Lokasi Absolut : lokasi yang berkenaan dengan posisi menurut koordinat garis lintang dan garis bujur (letak astronomi). Dimana lokasi absolut suatu tempat dapat diamati dengan peta
- b. Lokasi Relatif : lokasi suatu tempat yang bersangkutan terhadap kondisi – kondisi wilayah lain yang ada disekitarnya.

Dari sekian banyak teori lokasi , pada prinsipnya semua sama, yaitu bagaimana menentukan pusat lokasi industri yang lebih baik.

3. Teori Daya Tarik Industri

Faktor – faktor daya tarik antara lain sebagai berikut :

1. Nilai tambah yang tinggi per pekerja (produktivitas)

Ini berarti industri tersebut memiliki sumbangan yang penting tidak hanya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga terhadap pembentukan PDRB.

2. Industri – industri ikatan

Ini berarti perkembangan industri – industri tersebut akan meningkatkan total nilai tambah daerah atau mengurangi “kebocoran ekonomi” dan ketergantungan impor.

3. Daya saing di masa depan

Hal ini sangat menentukan prospek dari pengembangan industri yang bersangkutan.

4. Spesialisasi industri

Sesuai dasar pemikiran teori – teori klasik mengenai perdagangan internasional, suatu daerah sebaiknya berspesialisasi pada industri – industri di mana daerah tersebut memiliki keunggulan komperatif.

5. Potensi ekspor

Dasar pemikirannya sama dengan no 2 atau 3.

6. Prospek bagi permintaan domestic

Dasar pemikirannya, yakni memberikan suatu kontribusi yang berarti bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui konsumsi lokal.

2.1.3 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya mencakup semua kegiatan pembangunan sektoral, regional khusus yang berlangsung di daerah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, instansi sektoral, pemerintah maupun anggota masyarakat. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan intitusi – intitusi baru, pembangunan industri – industri alternatif, dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara daerah dengan sektor swasta menurut Arsyad (2010).

Bagi daerah pembangunan ekonomi berarti agar meningkatnya kesejahteraan masyarakat daerah secara luas. Peningkatan konsumsi seperti barang dan jasa yang melalui penambahan produksi sehingga lapangan kerja yang memberikan kenaikan pendapatan masyarakat. Peningkatan produksi lapangan kerja itu sendiri hanya dapat dicapai jika ada investasi. Dengan demikian, peningkatan perekonomian masyarakat luas akan sangat tergantung dari besar sumberdaya yang dapat di investasikan dalam usaha produktif di daerah menurut Ahmad (1993).

Sementara itu pembangunan menurut (Todaro, 2006) merupakan kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional, demi mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Apa pun komponen spesifik atas “ Kehidupan yang serba lebih baik” yaitu mempunyai proses pembangunan masyarakat yang paling tidak harus memiliki tujuan seperti peningkatan ketersediaan serta perluasan berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok, peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupaya peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan serta peningkatan nilai – nilai cultural dan kemanusiaan, perluasan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan yaitu dengan membebaskan mereka dari belitan sikap mengeluh dan ketergantungan.

2.1.4 Konsep Otonomi daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan. Otonomi Daerah berasal dari kata otonomi dan daerah, dalam bahasa Yunani otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti peraturan sehingga bisa diartikan sebagai wewenang untuk membuat aturan berguna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah. Sedangkan pengertian dari desentralisasi dan otonomi daerah menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan otonom daerah di perlakukan wewenang dan kemampuan menggali sumber – sumber keuangan sendiri untuk mendukung pemerintah dan pembangunan. Sumber otonomi daerah antara lain berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain – lain pendapatan yang sah.

Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, bahwa sumber – sumber pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dan lain – lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah bersumber dari pembiayaan yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sehingga mampu

menjadi penyangga utama dalam pembiayaan kegiatan – kegiatan pembangunan daerah. Berdasarkan kebijakan otonomi daerah pemerintah daerah juga wajib untuk membina dan mengembangkan dunia usaha daerah sebagai pilar dalam pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk langkah itu yang utama dilakukan adalah investasi daerah. Pemberdayaan investasi daerah adalah suatu upaya harus dilakukan secara sistematis untuk mendorong peningkatan investasi di daerah menurut Evi Susanti Tasri (2010).

2.1.5 Perubahan Struktur Ekonomi

Pengembangan ekonomi jangka panjang dengan pertumbuhan akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional seperti pertanian sebagai sektor utama ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor – sektor non primer. Khususnya industri manufaktur dengan *increasing return to scale* (relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas) yang dinamis sebagai utama penggerak pertumbuhan ekonomi menurut Dr Tulus (2009).

Hollis B. Chenery yang sangat terkenal dengan analisis empirisnya tentang “pola – pola pembangunan” yang memusatkan pada proses untuk mengubah struktur ekonomi, industri dan kelembagaan secara bertahap pada suatu perekonomian yang terbelakang, sehingga meningkatkan penemuan industri – industri baru untuk menggantikan kedudukan sektor pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa peningkatan tabungan dan

investasi merupakan syarat yang harus dipenuhi, akan tetapi tidak akan memadai jika harus berdiri sendiri dalam memacu pertumbuhan ekonomi menurut Todaro dan Smith (2004).

2.1.6. Teori Basis Ekonomi dan Sektor Unggulan

Menurut (Trigan, 2005) berdasarkan teori basis ekonomi, perekonomian suatu wilayah dibagi menjadi dua yaitu sektor basis adalah kegiatan – kegiatan yang mengekspor barang dan jasa ke luar batas – batas perekonomian wilayah yang bersangkutan. Sektor basis (sektor unggulan) pada dasarnya harus dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik dari perbandingan berskala internasional maupun nasional. Dalam kaitannya dengan lingkup internasional suatu sektor dikatakan unggul jika sektor tersebut mampu bersaing dengan Negara lain sedangkan dalam lingkup nasional suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggul apabila sektor wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain di pasar nasional atau domestik. sedangkan sektor non basis merupakan kegiatan – kegiatan yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang – orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian.

Pendekatan basis ekonomi sebenarnya dilandasi pada pendapat bahwa yang perlu dikembangkan di sebuah wilayah adalah ke mampuan memproduksi dan menjual hasil produksi tersebut secara efisien dan efektif. Secara umum analisis ini digunakan untuk menentukan sektor basis atau non basis dengan tujuan agar bisa melihat keunggulan komparatif suatu daerah dalam menentukan sektor

andalannya. Sektor basis yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar domestic maupun pasar luar daerah itu sendiri. Sektor basis mampu menghasilkan produk atau jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah. Sektor ini dalam melakukan aktivitasnya mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri maupun daerah lain dan dapat dijadikan sektor unggulan.

Untuk mengetahui apakah sektor merupakan sektor basis atau non basis dapat digunakan beberapa metode, yaitu metode pengukuran langsung, metode pengukuran tidak langsung, metode campuran dan metode Location Quotient (LQ). Metode pengukuran langsung dapat dilakukan dengan survey langsung kepada pelaku usaha kemana mereka memasarkan barang yang diproduksi dan dari mana mereka membeli bahan – bahan kebutuhan untuk melunasi produk tersebut. Metode tidak langsung dapat juga digunakan asumsi atau metode asumsi. Dalam metode asumsi berdasarkan kondisi wilayah (data sekunder) ada kegiatan tertentu yang diasumsikan sebagai kegiatan basis dan non basis.

Selanjutnya metode campuran, dalam campuran menggabungkan metode asumsi dengan metode langsung. Dalam metode campuran diadakan survei pendahuluan yaitu pengeumpulan data sekunder. Asumsinya apabila 70% atau lebih produknya diperkirakan dijual ke wilayah maka itu langsung dianggap basis, sebaliknya apabila 70% atau lebih dipasarkan ditingkat lokal maka langsung dianggap non basis. Selanjutnya metode Location Quotient (LQ) yaitu membandingkan porsi PDRB atau nilai tambah untuk sektor yang sama secara nasional.

Dari ke empat metode tersebut metode Location Quotient (LQ) yang lazim atau banyak dipakai oleh pakar – pakar ekonomi dalam menentukan sektor basis menurut (Trigan, 2005).

2.1.7. Konsep Analisis Indeks Spesialisasi

Analisis indeks Spesialisasi (IS) ini merupakan salah satu cara untuk mengukur perilaku dinamika kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Misalnya bagaimana distribusi atau persebaran dari pendapatan regional (PDRB) di suatu wilayah. Model ini berguna untuk menganalisis tingkat konsentrasi sektor kegiatan secara relatif khususnya jika dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas

(Provinsi atau nasional). kriteria pengukuran indeks spesialisasi adalah sebagai berikut :

1. Bila indeks spesialisasi regional mendekati nilai nol, maka kedua daerah j dan k tidak memiliki spesialisasi.
2. Bila indeks spesialisasi regional mendekati nilai dua maka kedua daerah j dan k memiliki spesialisasi.
3. Batas tengah antara angka nol dan dua tersebut adalah satu, dan oleh karena itu bila suatu sektor memiliki nilai indeks spesialisasi regional yang lebih besar dari satu maka sektor tersebut dapat dianggap sebagai sektor yang memiliki spesialisasi.

Untuk melihat tinggi rendahnya tingkat spesialisasi suatu daerah terhadap daerah lainnya, dipergunakan nilai rata – rata indeks spesialisasi regional dari seluruh daerah.

2.1.8. Konsep Analisis Shift Share

Analisis shift share merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dengan perekonomian nasional. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar. Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam 3 bidang yang berhubungan satu sama lainnya yaitu: pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan pertumbuhan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan., pergeseran Proporsional (*Proportional Shift*) mengukur perubahan relatif, pertumbuhan atau penurunan pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri – industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan acuan., pergerakan diferensial (*Differential Shift*) membantu kita dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Oleh karena itu jika pergeseran diferensial dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi daya saingnya ketimbang industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan menurut Nurul Huda (2007).

Analisis Shift Share juga membandingkan perubahan laju pertumbuhan berbagai sektor (industri) di daerah kita dengan wilayah nasional. Akan tetapi, metode ini lebih tajam dibandingkan metode LQ tidak memberikan penjelasan atas faktor penyebab perubahan sedangkan metode Shift Share merinci penyebab perubahan atas beberapa variable. Analisis ini menggunakan metode pengisolasian beberapa faktor yang perubahan struktur industri dalam suatu daerah dalam pertumbuhan ekonomi satu kurun waktu berikutnya menurut (Trigan, 2005).

Analisis Shift Share dapat menggunakan variable lapangan kerja atau nilai tambah. Akan tetapi yang terbanyak digunakan adalah lapangan kerja karena datanya lebih mudah di peroleh. Apabila menggunakan nilai tambah maka sebaiknya menggunakan data harga konstan dengan tahun dasar yang sama. Karena apabila tidak maka bobotnya tidak sama dan perbandingannya itu menjadi tidak valid menurut (Trigan, 2005).

2.2. Penelitian Terdahulu

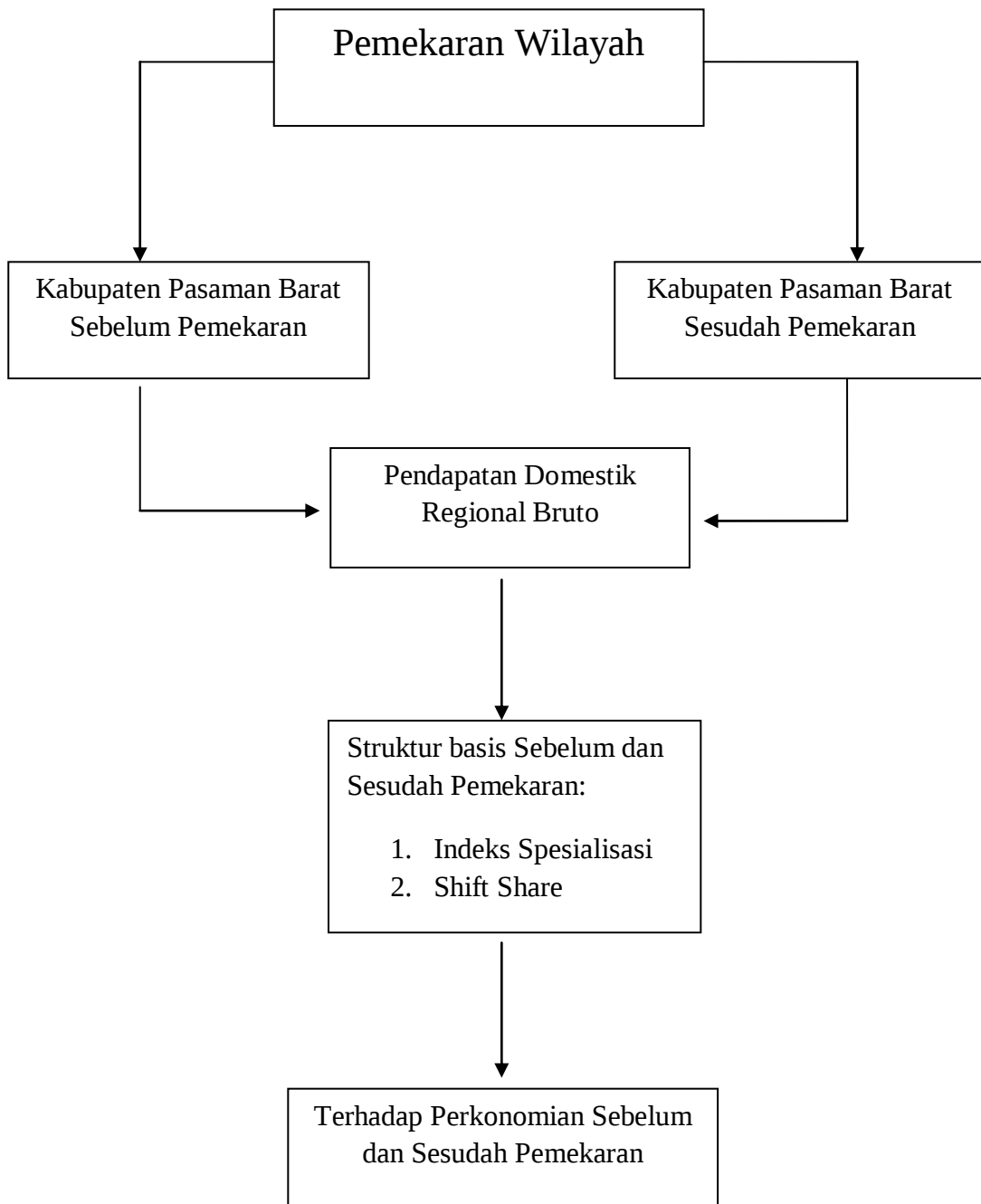
No	Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yolamalinda 2014	Analisis potensi Ekonomi daerah dalam Pengembangan Komoditi Unggulan Kabupaten Agam	LQ (Lacation Quontient), Indeks Spesialisasi (IS), Shift share SWOT	PDRB	Hasil analisis menemukan bahwa subsector industri pengolahan memiliki keunggulan dan daya saing sehingga berpotensi dikembangkan untuk peningkatan perekonomian daerah
2	Raden Hady Santika, Budi Santoso, Hadi Mahmudi (2018)	Analisis dampak pemekaran daerah terhadap kinerja dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Lombok Utara	Kuantitatif	PDRB, PDRB Perkapita, Pemerataan Ekonomi, Kesehatan dan Infrastruktur	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja ekonomi, kinerja pelayanan public dan pemerataan ekonomi setelah pemekaran daerah mengalami peningkatan.
3	Andy Pratama dan Ady Soejoto (2013)	Pengaruh sektor basis dan non basis terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruanekonomi	analisis deskriptif, location quotient (LQ), uji asumsi klasik, uji hipotesis dan koefisien determinan	pertumbuhan ekonomi, basis dan non basis	Hasil pengolahan data diperoleh bahwa Variabel sektor basis memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan. Kemudian variabel sektor non basis memiliki pengaruh signifikan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan. Sektor basis dan sektor non basis secara bersama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

					Pasuruan. Hal ini berarti jika sektor basis dan sektor non basis ditingkatkan maka akan dipengaruhi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan.
4	Evaida Ulfha Aunies, Prof. Dr. Abubakar Hamzah, Prof. Dr. Mohd Nur Syecalad, MS (2015)	Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Tengah Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah	Time series	PDRB, Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk, indeks pembangunan manusia, Dummy variable	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan Sesudah pemekaran lebih dipengaruhi oleh pengeluaran daerah dan IPM
5	Nyayu Neti Arianti dan Indra Vahyadinata (2014)	Kajian dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah Pesisir Di Provinsi Bengkulu	Indeks Wiliamson (IW)	PDRB atas harga Konstan dan jumlah penduduk	Hasil dari penelitian ini dapat kita simpulkan maka perlu dilakukan pemerataan penyebaran sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, prasarana penunjang anantara DI dan DOB agar daerah – daerah tersebut berkembang dengan seimbang sehingga pemerataan kesejahteraan dapat terwujud.
6	Sjamsu Djohan, Zamruddin Hasid, dan Djoko Setyadi (2016)	Pengeluaran Pemerintah Sebagai Determinan Pertumbuhan Ekonomi dan	Indeks Wiliamson (IW)	Pertumbuhan ekonomi, belanja Pemerintah, Ketimpangan pendapatan	Hasil ini juga menunjukkan bahwa variasi pertumbuhan ekonomi efek kecil dan negative, tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Selanjutnya, variasi dalm penelitian pengeluaran memiliki efek positif yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil ini studi tidak

		Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Kepulauan Indonesia			menemukan adanya efek tidak langsung dari variasi dalam pengeluaran pemerintah melalui variasi pertumbuhan ekonomi pada ketimpangan pendapatan antar provinsi di Pulau Indonesia.
7	Hardiani dan Tona Aurora Lubis (2017)	Analisis Sektor Unggulan Kota Jambi	Location Quotient, Shift Share, Klassen Tipologi dan Analisis Overlay	PDRB	Hasil analisis ditemukan bahwa dari 14 sektor dasar di Kota Jambi berdasarkan analisis LQ, ada empat sektor Prioritas yaitu listrik dan gas pengadaan, bangunan, perdagangan besar dan enceran, mobil dan sepeda motor perbaikan, pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial.
8	Anggraeny Puspaningtyas, Susilo Zauhar dan Lely Indah Mindarti (2016)	Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi daerah Berdasarkan Potensi Lokal Pembangunan Ekonomi Dan Peningkatan Daya Saing Daerah (Studi Pembangunan Ekonomi)	Lacation Quotient dan Shift Share	Perencanaan pembangunan ekonomi, Potensi Daerah dan Perencanaan Interaktif	Berdasarkan analisis menggunakan LQ dan Shift share, lokal potensi ekonomi Blitar selama 2010-2014 adalah sektor pertanian dan sektor jasa. Sedangkan potensi daya saing ekonomi selama tahun 2010-2014 adalah sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restorran, dan sektor manufaktur. Proses perencanaan yang dilakukan di Blintar dilihat dari prinsip partisipasi masih kurang dilaksanakan proses perencanaan antusias dilakukan oleh SKPD yang sangat tinggi tetapi tidak didukung dengan sumber daya manusia dan keuangan.
9	Anggraeny Puspaningtyas, Siti Rochmah	Analisis Potensi Ekonomi Lokal dan Sektor	Lacation Quotient dan Shift	Sektor unggulan, sektor yang	Hasil penelitian memiliki tiga sektor unggulan selama 2007-2010, yaitu sektor jasa – jasa, sektor perdagangan hotel dan bangunan/konstruksi. Sektor unggulan yang

	dan Lely Iindah Mindarti (2011)	Ekonomi Daya Saing Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Lokal	Share	berdaya saing dan PAD	memberikan kontribusi terhadap PAD adalah jasa – jasa, hotel dan sektor restoran. Sektor pertanian sejak 2007-2010 tidak menjadi sektor saing dan secara tidak langsung memiliki kontribusi terhadap PAD. Sarana untuk mengembangkan sektor pertanian yang mulai turun produksinya dan orang - orang yang bekerja di setiap sektor terutams di bidang pertanian
10	Willy Arafah dan Ryan Corinus Dato Matheos (2017)	Menentukan faktor sektor ekonomi potensi Kabupaten Banteng di Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia	Location Quotient (SLQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ).	Sektor Trrade dan Ritel, Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Real Estat, Sektor kesehatan, jasa dan sosial	Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2014 sektor perdagangan dan ritel: sektor perbaikan mobil dan sepeda motor. Sektor real, sektor pemerintahan: pertahanan dan wajib jaminan sosial dan sektor jasa lainnya adalah sektor ekonomi terkemuka di Kabuoaten Banteng di tahun 2014 -2015.

2.3. Kerangka Penelitian



2.4. Hipotesis

Diduga adanya potensi sektoral dan sektor unggulan sebelum dan sesudah pemekaran wilayah yang berpengaruh signifikan terhadap perekonomian di Kabupaten Pasaman Barat